

BAB IV

GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGEHEL DAN BUMDES BERSAMA NUSANTARA

Bab ini menjelaskan tentang profil Kecamatan Ngebel dan BUMDES Bersama Nusantara. Bab IV terdiri dari dua bagian yaitu profil Kecamatan Ngebel dan deskripsi tentang BUMDES Bersama Nuasantara. Bab ini menjadi titik awal penjelasan dan pembahasan pada bab selanjutnya untuk mengetahui pengelolaan kerjasama antardesa serta hambatan pelaksanaan kerjasama antardesa BUMDES Bersama Nusantara.

4.1. Kecamatan Ngebel

Kecamatan Ngebel merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari delapan desa diantaranya yaitu Desa Talun, Pupus, Gondowido, Ngebel, Sahang, Sempu, Wagir Lor dan Ngrogung. Luas wilayah Kecamatan Ngebel yaitu 59,51 km² yang terbagi menjadi lahan pertanian seluas 28,83 km² dan lahan non-pertanian seluas 30,68 km². Penggunaan lahan non-pertanian sebagian besar merupakan hutan negara yaitu 18,27 km², bangunan dan halaman sekitar 12,25 km², dan lainnya sebesar 15,68 hektar merupakan lahan tandus, lapangan, dll.⁴⁶ Desa yang memiliki wilayah hutan negara terluas adalah Desa Pupus dan Desa Talun.

⁴⁶ Statistik Daerah Kecamatan Ngebel 2016



Gambar 4.1.Peta Kecamatan Ngebel
Sumber: Statistik Kecamatan Ngebel 2016

Kecamatan Berhawa sejuik ini berada pada ketinggian antara 385 meter sampai dengan 1052 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan:

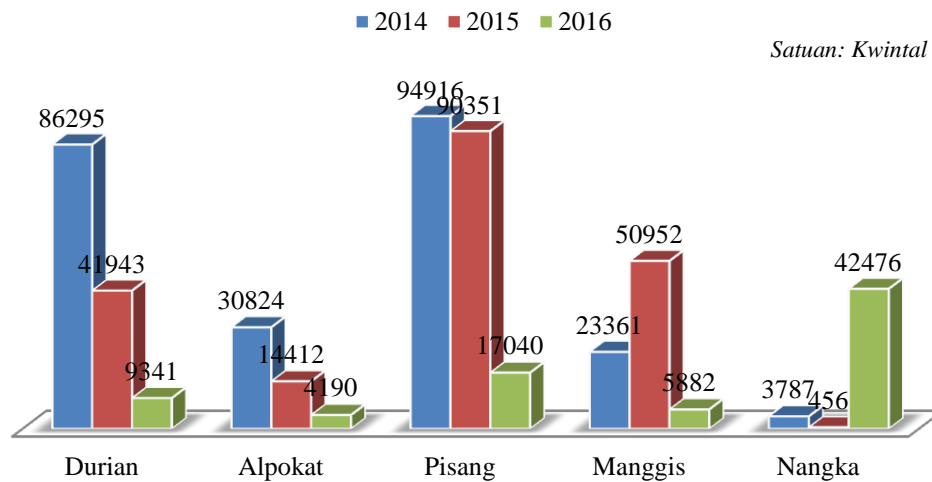
Tabel 4.1.Letak Kecamatan Ngebel

Sebelah utara	Kabupaten Madiun
Sebelah timur	Kabupaten Kediri
Sebelah selatan	Kecamatan Pulung
Sebelah barat	Kecamatan Jenangan

Sumber: Diolah Penulis dari Statistik Daerah Kecamatan Ngebel 2016, 2017

Letaknya yang berada di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Ngebel memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu hasil bumi Kecamatan Ngebel yaitu buah-buahan seperti Durian, Alpokat, Pisang, Manggis dan Nangka. Dari beberapa hasil buah potensial di Kecamatan Ngebel, Durian lah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kecamatan Ngebel. Hasil produksi buah-buahan tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Hasil Produksi Buah-buahan Potensial Kecamatan Ngebel Tahun 2014-2016



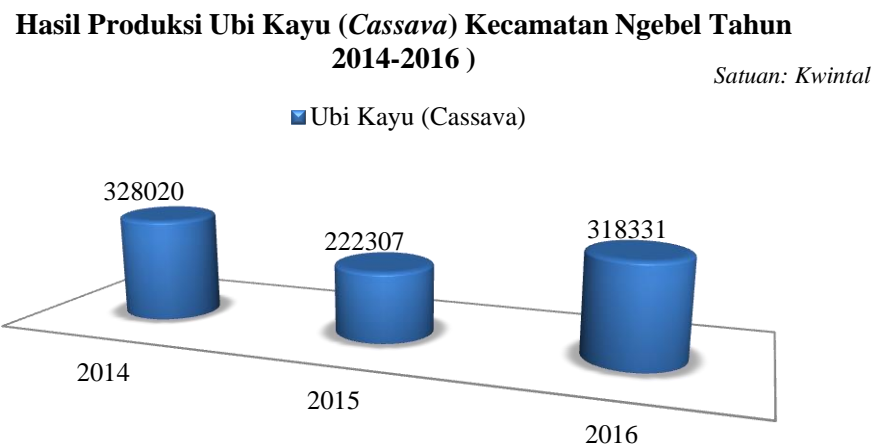
Gambar 4.2. Histogram Hasil Produksi Buah-buahan Potensial Kecamatan Ngebel Tahun 2014-2016

Sumber: Diolah penulis dari data Kecamatan Ngebel Dalam Angka 2017, 2017

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngebel memiliki potensi buah-buahan yang sangat besar. Kecamatan ini mampu menghasilkan buah-buahan seperti durian, alpokat, pisang, manggis dan nangka hingga ratusan bahkan ribuan Ton per tahun. Seperti potensi durian pada tahun 2014 yang menghasilkan 86.295 Kwintal atau 8.629 Ton per tahun. Selain itu juga terdapat potensi pisang mampu menghasilkan 94.916 Kwintal atau 9.491 Ton per tahun. Potensi yang demikian besar apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Selama ini mayoritas hasil perkebunan tersebut dijual langsung dan baru sedikit yang dijadikan produk olahan. Oleh karena itu jika potensi ini dikelola dengan baik dan dijadikan produk olahan maka akan meningkatkan harga jual produk. Selain dijadikan produk olahan, potensi buah yang demikian besar dapat dijadikan

wisata berupa Agrowisata yang didukung dengan potensi alam lainnya di Kecamatan Ngebel.

Selain komoditi buah-buahan, komoditi potensial lainnya yaitu kopi dan ubi kayu. Berikut merupakan hasil produksi ubi kayu Kecamatan Ngebel Tahun 2014-2016:



Gambar 4.3. Histogram Hasil Produksi Ubi Kayu (*Cassava*) Kecamatan Ngebel Tahun 2014-2016

Sumber: *Diolah penulis dari data Kecamatan Ngebel Dalam Angka 2017, 2017*

Hasil produksi ubi kayu di Kecamatan Ngebel sangat besar yang mampu menghasilkan puluhan ribu Ton ubi kayu per tahun. Tahun 2016 Kecamatan Ngebel mampu menghasilkan 318.331 Kintal atau 31.833 Ton ubi kayu. Potensi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain potensi yang telah disebutkan masih ada potensi perkebunan lainnya di Kecamatan Ngebel.

Tidak hanya hasil alam, di Kecamatan Ngebel terdapat Telaga Ngebel yang merupakan objek wisata andalan Kabupaten Ponorogo yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Telaga Ngebel memiliki luas ± 150 Ha yang di

kelilingi oleh empat desa yaitu Desa Ngebel, Sahang, Wagir Lor, dan Gondowido.

Objek wisata ini mampu menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya.



Gambar 4.4. Objek Wisata Telaga Ngebel
Sumber: pesonajatim.com

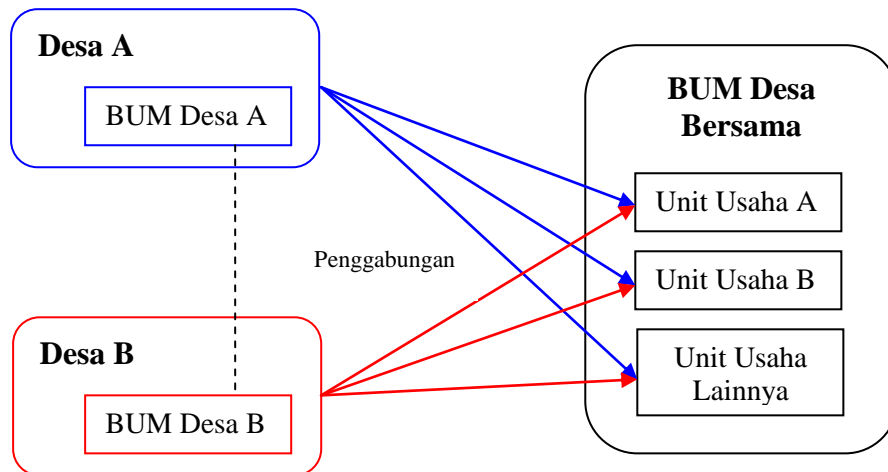
4.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Nusantara

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada desa untuk menjalin kerjasama antar desa termasuk di dalamnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama). Pembentukan BUMDES Bersama dapat dilakukan oleh dua desa atau lebih melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

Pertama, pendirian BUMDES Bersama. BUMDES Bersama secara langsung didirikan oleh dua desa atau lebih dalam skema kerjasama untuk memberikan pelayanan usaha antar-desa. Istilah “Pendirian BUMDES Bersama” dalam pasal 141 PP No.43 Tahun 2014 Jo PP No.47 Tahun 2015 tidak mensyaratkan terbentuknya BUMDES skala lokal desa terlebih dahulu, tanpa

meninggalkan alas sosial kerjasama antardesa.⁴⁷

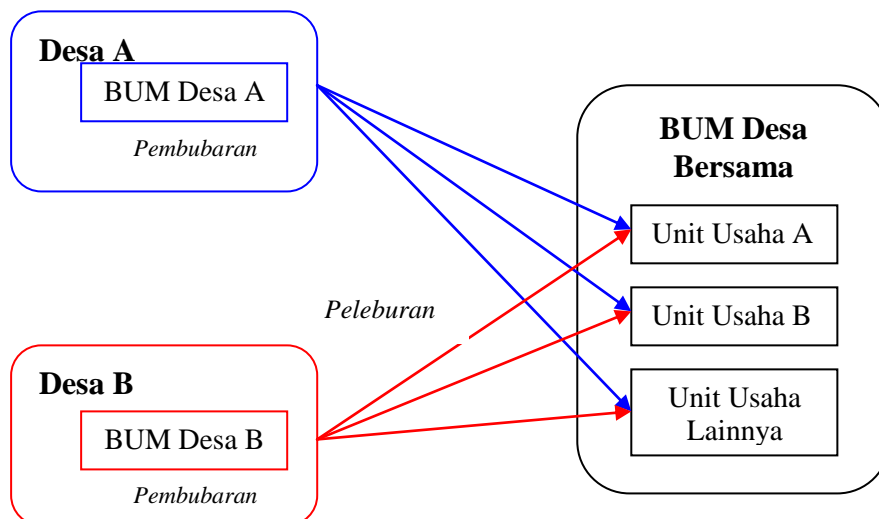
Kedua, penggabungan BUMDES Bersama. BUMDES Bersama didirikan dengan menggabungkan dua atau lebih BUMDES lokal desa.



Gambar 4.5. Penggabungan BUMDES

Sumber: Diolah Penulis dari Pedoman Teknis BUM Desa Bersama, 2017

Ketiga, Peleburan BUMDES Bersama. BUMDES Bersama didirikan atas peleburan dua atau lebih BUMDES lokal desa. Peleburan dilakukan dengan membubarkan BUMDES lokal masing-masing desa.



Gambar 4.6. Peleburan BUMDES

Sumber: diolah penulis dari Pedoman Teknis BUM Desa Bersama, 2017

⁴⁷ Pedoman Teknis BUM Desa Bersama

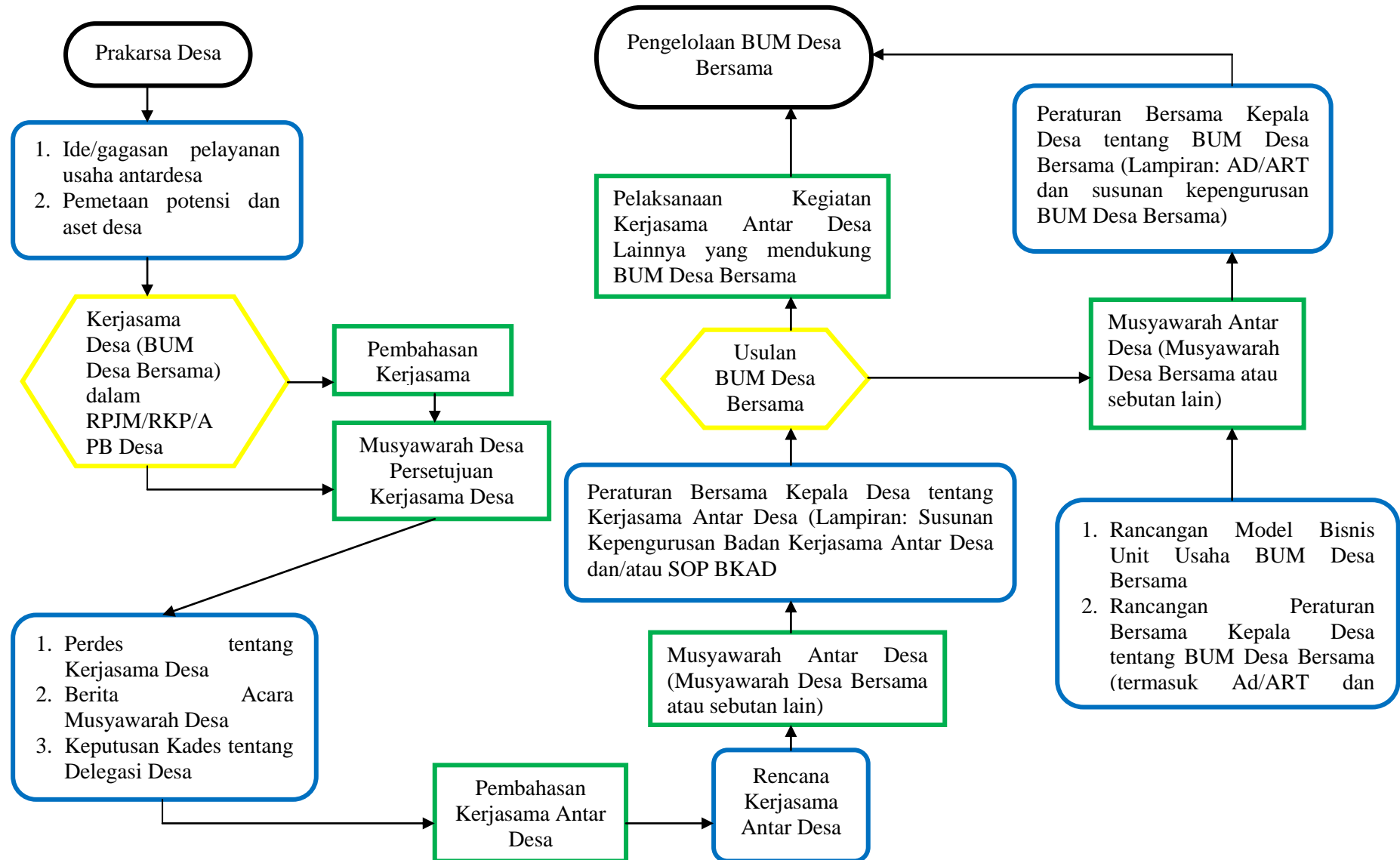
Perbedaan BUMDES dan BUMDES Bersama dapat dilihat dari aspek pelebagaan berupa dasar hukum, paradigma, basis lokasi dan prosedur .

Tabel 4.2.Perbedaan BUMDES Lokal Desa dan BUMDES Bersama

Aspek Pelebagaan	BUM Desa	BUM Desa Bersama
Dasar Hukum	Norma yuridis tentang pelebagaan BUM Desa (vide Pasal 8790 UU Desa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Norma Yuridis tentang kelembagaan BUM Desa (vide Pasal 87-90 UU Desa) ▪ Alas sosial: kerjasama antar desa, pelayanan usaha antar desa, BUM Desa yang dimiliki 2 Desa atau Lebih (vide Pasal 92 ayat (6) UU Desa) ▪ Lokus/kedudukan pengembangan usaha antar-desa: kawasan perdesaan (vide Pasal 83-85 UU Desa)
	Pengaturan teknis kelembagaan BUM Desa skala lokal Desa (vide Pasal 132-140 PP No.43/2014 jo. PP No.47/2015)	Pengaturan khusus tentang BUM Desa Bersama (pendirian, penggabungan, peleburan BUM Desa): vide Ps.141 PP No.43/2014 jo. PP No.47/2015. Pengaturan teknis kelembagaan dengan mengikuti substansi hukum dalam kelembagaan BUM Desa skala lokal Desa (vide Pasal 132-140 PP No.43/2014 jo. PP No.47/2015)
Paradigma	Desa Membangun	Membangun Desa
Basis Lokasi	Desa, dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa	Desa yang bersepakat melakukan kerjasama antar-desa
Prosedur	Musyawarah Desa	Musyawarah antar-desa atau sebutan lain (Musyawarah Desa Bersama dll)

Sumber: Pedoman Teknis BUM Desa Bersama

Pendirian BUMDES Bersama dimulai dari adanya pakarsa desa, musyawarah desa dan musyawarah antardesa. Berikut merupakan alur pendirian BUMDES Bersama:



Gambar 4.7. Alur Pendirian BUMDES Bersama
Sumber: Pedoman Teknis BUM Desa Bersama

Prakarsa desa. Prakarsa Desa tumbuh dari kesadaran desa untuk melakukan kerjasama antar-desa dalam mengelola sumber daya bersama. Dalam tahap ini terdapat proses pembentukan ide/gagasan pelayanan usaha antar desa untuk memanfaatkan potensi dan aset desa melalui langkah 3D (Dipetakan, Direncanakan, Dikelola) berskala kerjasama antardesa. Indikator pemetaan potensi desa yaitu:⁴⁸

- a. Manusia: Petakan aset manusia (*human asset*) seperti pengetahuan, ketrampilan, sumber penghidupan, pola nafkah etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan/representasi dan lainnya.
- b. Alam: sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman, sumber daya alam, dan lainnya.
- c. Sosial: kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring, dan sebagainya.
- d. Finansial: tabungan, iuran warga, PADesa (Pendapatan Asli Desa), upah, dan lainnya.
- e. Fisik: tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya.

Musyawarah desa tentang kerjasama desa. Setelah pemetaan potensi desa, selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk membahas ruang lingkup kerjasama desa dalam hal ini BUMDES Bersama dan menunjuk perwakilan desa yang akan mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD). Musyawarah desa akan menghasilkan Perdes tentang kerjasama desa, berita acara musyawarah desa, dan keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa.

Musyawarah Antar Desa. Sebelum dilaksanakan musyawarah antardesa, terlebih dahulu dilakukan pra-musyawarah antardesa membahas rencana kerjasama antar desa. Agenda pembahasan fokus pada kebutuhan yang menjadi peluang setiap desa untuk melakukan pengembangan usaha bersama, kegiatan

⁴⁸ Ibid, hlm.17

kemasyarakatan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat antardesa dilakukan kerjasama antardesa.⁴⁹ Selanjutnya dilakukan musyawarah antardesa dengan agenda usulan rencana kerjasama antardesa, usulan tata kerja BKAD, pemilihan kepengurusan BKAD, rancangan Permakades tentang kerjasama antardesa, dan usulan penetapan Permakades tentang BKAD (*opsional*).⁵⁰ Musyawarah antardesa menghasilkan Permakades tentang kerjasama antardesa. Tahap selanjutnya yaitu pembahasan rencana pendirian BUMDES Bersama yang difasilitasi oleh BKAD bersama dengan pihak kecamatan dan/atau pendamping profesional organisasi masyarakat lainnya yang peduli dengan edukasi desa. Musyawarah antardesa tentang pendirian BUMDES Bersama dilakukan dengan agenda pembahasan: usulan unit usaha BUMDES Bersama, Rancangan Permakades tentang pendirian BUMDES Bersama dan pemilihan pengurus BUMDES Bersama.⁵¹

4.2.1. Sejarah Pendirian BUMDES Bersama Nusantara

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Nusantara merupakan sebuah badan usaha ekonomi hasil kesepakatan kerjasama delapan desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Berawal dari adanya kesadaran delapan desa untuk untuk lebih memaksimalkan pengelolaan potensi alam dan wisata Ngebel agar kekayaan potensi lebih memiliki efek kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa-desa.

⁴⁹ Ibid, hlm.33

⁵⁰ Ibid, hlm.34

⁵¹ Ibid, hlm 37-38



Gambar 4.8. Bumdes Bersama Nusantara
Sumber: Instagram @bumdesbersama_ngebel

Pendirian BUM Desa Bersama Nusantara dimuali dengan musyawarah desa oleh masing-masing desa sejak 29 September sampai dengan 24 Oktober 2016. Dalam proses ini desa menerbitkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa sekaligus menunjuk 6 orang perwakilan untuk mengikuti musyawarah antardesa pada 2 November 2016. Pada musyawarah antardesa diikuti oleh seluruh delegasi desa anggota kerjasama, pihak Kecamatan, pendamping desa dan Jarkom Desa. Pembahasan dalam musyawaah antar-desa yaitu terkait penentuan unit usaha, pembentukan kepengurusan BKAD dan BUMDES Bersama, serta AD/ART. Kesepakatan delapan desa kemudian dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang ditandatangani semua kepala desa.

Pembentukan BUM Desa Bersama Nusantara dilakukan dengan maksud sebagai berikut:⁵²

⁵² Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrogung, Kepala Desa Sahang, Kepala Desa Wagir Lor, Kepala Desa Talun, Kepala Desa Gondowido, Kepala Desa Pupus, Kepala Desa Ngebel dan Kepala Desa Sempu Nomor 02 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Nusantara”

1. Meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
2. Meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa; dan
3. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerjasama antar desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan maksud yang telah dijelaskan tersebut maka tujuan pendirian

BUMDES Bersama Nusantara adalah:⁵³

1. Meningkatkan kerjasama antardesa dalam usaha ekonomi desa di kawasan perdesaan;
2. Mewadahi pelaku ekonomi desa di kawasan perdesaan dalam usaha bersama yang produktif;
3. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perdesaan;
4. Melindungi masyarakat desa di kawasan perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak ada masyarakat desa; dan
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa berdasarkan hasil usaha bersama di kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan BUMDES Bersama Nusantara memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵⁴

1. *Kooperatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
2. *Partisipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa Bersama;
3. *Emansipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
4. *Transparan*, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

5. *Akuntabel*, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa Bersama.

4.2.2. Payung Hukum

Berikut merupakan payung hukum pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antar desa BUMDES Bersama Nusantara di Kecamatan Ngebel:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB IX Pasal 91-93 tentang kerjasama desa)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (BAB IV Bagian kelima pasal 141-142 tentang pendirian BUM Desa Bersama dan BAB IX pasal 143-149 tentang kerjasama desa)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
5. Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrogung, Kepala Desa Sahang, Kepala Desa Wagir Lor, Kepala Desa Talun, Kepala Desa Gondowido, Kepala Desa Pupus, Kepala Desa Ngebel dan Kepala Desa Sempu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Antar Desa
6. Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrogung, Kepala Desa Sahang, Kepala Desa Wagir Lor, Kepala Desa Talun, Kepala Desa Gondowido, Kepala Desa Pupus, Kepala Desa Ngebel dan Kepala Desa Sempu Nomor 02 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Nusantara”

4.2.3. Kepengurusan BKAD dan BUMDES Bersama Nusantara

Kerjasama antar-desa di Kecamatan Ngebel dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat yang masih aktif di desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender (pasal 8).⁵⁵ Berikut merupakan struktur organisasi Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Ngebel:

Tabel.4.3. Susunan Organisasi BKAD Kecamatan Ngebel Tahun 2016-2022

No	Nama	Jabatan	Asal Desa
1.	Mulyono	Ketua	Desa Ngrogung
2.	Anan Riyanto	Sekretaris	Desa Ngebel
3.	Rini Sudarwati	Bendahara	Desa Talun
4.	Eva	Koordinator unit kerja pengembangan ekonomi dan usaha bersama	Desa Wagir Lor
5.	Edi Saputro	Anggota unit kerja pengembangan ekonomi dan usaha bersama	Desa Pupus
6.	Rio	Koordinator unit kerja sosial kemasyarakatan	Desa Sempu
7.	Tumari	Anggota unit kerja sosial kemasyarakatan	Desa Gondowido
8.	Agus	Koordinator unit kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-des	Desa Sahang

Sumber: Permakades Kerjasama Antar Desa no.1 Tahun 2016, data diolah 2017

Badan Kerjasama Antar Desa bertugas memfasilitasi musyawarah desa bersama mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerjasama antar-des.

Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari: *pertama*, penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa yang sekaligus merupakan perwakilan

⁵⁵ Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrogung, Kepala Desa Sahang, Kepala Desa Wagir Lor, Kepala Desa Talun, Kepala Desa Gondowido, Kepala Desa Pupus, Kepala Desa Ngebel dan Kepala Desa Sempu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Antar Desa

dari desa dalam BKAD serta camat Kecamatan Ngebel. *Kedua*, Pelaksana operasional BUM Desa Bersama adalah masyarakat Kecamatan Ngebel yang merupakan delegasi desa dalam BKAD dan bukan merupakan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana operasional terdiri dari manajer, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha. *Ketiga*, pengawas yang berasal dari unsur BKAD dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngebel. Pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Masa bakti kepengurusan BUMDES Bersama adalah 6 tahun dan sebelum waktu yang ditentukan dapat dilakukan pergantian pengurus karena terdapat masalah tertentu sesuai dengan aturan dalam AD/ART BUMDES Bersama Nusantara. Berikut merupakan susunan kepengurusan BUMDES Bersama Nusantara:

**Tabel.4.4.Susunan Kepengurusan BUMDES Bersama Nusantara
Kecamatan Ngebel Periode 2016-2022**

No.	Nama	Jabatan	Asal Desa
1.	Suseno	Penasehat	Camat Ngebel
2.	Supadi	Penasehat	Kepala Desa Ngrogung
3.	Slamet	Penasehat	Kepala Desa Sahang
4.	Suprpto	Penasehat	Kepala Desa Wagir Lor
5.	Waroto	Penasehat	Kepala Desa Talun
6.	Purwanto	Penasehat	Kepala Desa Gondowido
7.	Sijo	Penasehat	Kepala Desa Pupus
8.	Mujiono	Penasehat	Kepala Desa Ngebel
9.	Fikso Rubianto	Penasehat	Kepala Desa Sempu
10.	Badan Kerjasama Antar Desa	Pengawas	
11	Arif Fudiyanto	Pengawas	Kasie Pemas Kecamatan Ngebel
12.	Sumono	Ketua	Desa Wagir Lor
13.	Feri Khoirul Imam	Wakil Ketua	Desa Wagir Lor

	Muklis		
14.	Effendi	Sekretaris	Desa Sahang
15.	Ririk Fiawan	Bendahara	Desa Ngebel
16.	Suprpto	Kepala Unit Simpan Pinjam	Desa Talun
17.	Ipung Subagyo	Unit Toko Grosir	Desa Ngrogung
18.	Gianto	Unit Toko Grosir	Desa Gondowido
19.	Saikan	Unit Pariwisata	Desa Pupus
20.	Fatmario Pandaki	Pengelola desa smart	Desa Sempu
21.	Ongki Brian Pradana	Pengelola desa smart	Wagir Lor

Sumber: Permakades Pendirian BUM Desa Bersama Nusantara no.2 Tahun 2016, data diolah 2017

4.2.4. Pendanaan

Pendanaan kerjasama antardesa bersumber dari APBDes masing-masing desa. Dalam BUMDES Bersama 60% permodalan bersumber dari APBDes 8 desa yang berjumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan bertahap. Selebihnya 40% modal dapat bersumber dari masyarakat desa/pihak lain.

4.2.5. Kegiatan Usaha

BUMDES Bersama Nusantara menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan: Pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antardesa; Potensi pasar sarana dan prasarana produksi; Jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen; Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian; Usaha perikanan; Pariwisata, dan/atau Kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan desa.⁵⁶

Sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan bersama kepala desa usaha

⁵⁶ Ibid

yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah :⁵⁷

1. Kegiatan produksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan/atau
3. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Bersama “NUSANTARA” dalam rangka mengkonsolidasikan jenis usaha lokal.

Dalam menjalankan usaha ekonomi bersama secara maksimal maka BUM Desa Bersama dapat membentuk Unit Usaha Toko Grosir; Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Wisata yang ada; dan Usaha Simpan Pinjam. Pada tahun 2017 BUMDES Bersama Nusantara baru memiliki satu unit usaha yaitu Unit Usaha Desa’Smart yang melayani penjualan barang-barang kebutuhan pokok dan memfasilitasi penjualan produk unggulan desa se-Kecamatan Ngebel.

4.2.6. Operasionalisasi BUMDES Bersama Nusantara

Operasionalisasi BUMDES Bersama Nusantara dilaksanakan oleh pengurus operasional BUMDES Bersama yang merupakan delegasi desa. pelaksana operasional bertugas:⁵⁸

- a. Mengelola BUM Desa Bersama Nusantara di kawasan pedesaan
- b. Menumbuhkan prakarsa kerjasama antar BUM Desa Bersama Nusantara
- c. Mengembangkan kerjasama antara BUM Desa dan BUM Desa Bersama Nusantara
- d. Mengembangkan kerjasama BUM Desa Bersama Nusantara dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/pihak swasta
- e. Mewakili BUM Desa Bersama Nusantara di dalam dan diluar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa
- f. Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa Bersama Nusantara; dan

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ AD/ART BUMDES Bersama Nusantara, Pasal 7 (4)

g. Melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa Bersama.

BUMDES Bersama Nusantara memiliki satu karyawan yang menjalankan unit usaha desa smart. Berdasarkan penuturan pengurus BUMDES Bersama, gaji karyawan yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu)/bulan.

4.2.7. Pembagian Keuntungan

Pembagian Hasil Usaha BUMDES Bersama Nusantara diatur dalam pasal 15 Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang pendirian BUMDES Bersama Nusantara. Berikut proporsi pembagian keuntungan BUMDES Bersama Nusantara:⁵⁹

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa Bersama
- b. 25% (dua puluh lima per seratus) disetorkan kepada desa sebagai pendapatan asli desa
- c. 40% (empat puluh per seratus) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan
- d. Dana bantuan sosial.

⁵⁹ Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrogung, Kepala Desa Sahang, Kepala Desa Wagir Lor, Kepala Desa Talun, Kepala Desa Gondowido, Kepala Desa Pupus, Kepala Desa Ngebel dan Kepala Desa Sempu Nomor 02 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Nusantara”

4.2.8. Perkembangan Omzet

Berikut merupakan perkembangan Omzet BUMDES Bersama Nusantara tahun 2017:

Tabel 4.5. Perkembangan Omzet 2017

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	Rp. 3.527.400
2	Februari	Rp. 4.127.600
3	Maret	Rp. 3.659.900
4	April	Rp. 1.849.800
5	Mei	Rp. 2.759.400
6	Juni	Rp. 3.066.950
7	Juli	Rp. 2.209.100
8	Agustus	Rp. 1.705.600
9	September	Rp. 1.396.400
10	Oktober	Rp. 1.814.500
11	November	Rp. 915.800
12	Desember	-
Total		Rp.27.032.450

Sumber: Data Pendapatan Per Bulan, diolah penulis 2017

Total omzet BUMDES Bersama pada Januari hingga pertengahan November 2017 yaitu sebesar Rp.27.032.450. Omzet mengalami naik turun dengan omzet tertinggi pada bulan Februari sebesar Rp.4.127.600.